

**LAPORAN KEUANGAN AUDITED  
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
(018.09.0200.237291)  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



Jl. Tentara Pelajar No. 1 Cimanggu, Bogor 16111  
Tlp. (0251) 8313083 Fax. (0251) 8336194  
Website : <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id>  
Email : [bsip.perkebunan@pertanian.go.id](mailto:bsip.perkebunan@pertanian.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bogor, Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Syafaruddin, Ph.D

NIP. 19640827 199303 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
  - A. Penjelasan Umum
  - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
    - B.2. Belanja
    - B.3. Belanja Pegawai
    - B.4. Belanja Barang
    - B.5. Belanja Modal
      - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
    - C.1. Aset Lancar
      - C.1.1. Persediaan
    - C.2. Aset Tetap
      - C.2.1. Peralatan dan Mesin
      - C.2.2. Gedung dan Bangunan
      - C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan
      - C.2.4. Aset Tetap Lainnya
      - C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
    - C.3. Piutang Jangka Panjang
    - C.4. Aset Lainnya
      - C.4.1. Aset Lain-lain
      - C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
    - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
      - C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
      - C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka
    - C.6. Ekuitas
      - C.6.1. Ekuitas
  - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
    - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
    - D.2. Beban Pegawai
    - D.3. Beban Persediaan
    - D.4. Beban Barang dan Jasa
    - D.5. Beban Pemeliharaan
    - D.6. Beban Perjalanan Dinas
    - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
    - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
    - D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
  - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
  - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
  - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.4. Transaksi Antar Entitas
  - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
  - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111  
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194  
WEBSITE: <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: [bsip.perkebunan@pertanian.go.id](mailto:bsip.perkebunan@pertanian.go.id)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bogor, Mei 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Ir. Syafaruddin, Ph.D  
NIP. 196408271993031001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp159.073.750 atau mencapai 606% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 26.250.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.440.879.833 atau mencapai 95% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.167.258.000.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 21.825.958.661 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 154.052.100; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 21.570.628.250; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 101.278.311

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 70.958.009 dan Rp 21.755.000.652.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp88.000.010,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 16.207.619.802,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -16.119.619.792,00. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp 71.073.740 dan Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -16.048.546.052,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 24.447.368.071,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp -16.048.546.052,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 13.356.178.633,00 dan dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp.-2.692.367.419,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 21.755.000.652,00.

## **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022  
AUDITED**

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	26.250.000	159.073.750	606	150.370.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>26.250.000</b>	<b>159.073.750</b>	<b>606</b>	<b>150.370.000</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.2.	3.642.787.000	3.563.862.271	98	4.788.145.319
Belanja Barang	B.3.	10.287.090.000	9.642.122.562	94	9.143.298.478
Belanja Modal	B.4.	237.381.000	234.895.000	99	223.751.500
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>14.167.258.000</b>	<b>13.440.879.833</b>	<b>95</b>	<b>14.155.195.297</b>

Bogor, Mei 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Syafaruddin, Ph.D  
NIP. 196408271993031001

## II. NERACA

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**  
**NERACA**  
**31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**  
**AUDITED**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0	0
Persediaan	C.1.3.	154.052.100	1.761.908.550
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>154.052.100</b>	<b>1.761.908.550</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	21.670.531.997	22.490.137.090
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	22.579.596.742	22.270.329.192
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	2.820.600.250	2.943.665.250
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	88.463.941	88.463.941
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-25.588.564.680	-25.045.576.696
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>21.570.628.250</b>	<b>22.747.018.777</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.3.1.	1.111.077.413	168.407.320
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-1.009.799.102	-167.389.464
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>101.278.311</b>	<b>1.017.856</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>21.825.958.661</b>	<b>24.509.945.183</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	70.958.009	62.577.112
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2.	0	0
Utang Muka dari KPPN\	C.4.2.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>70.958.009</b>	<b>62.577.112</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>70.958.009</b>	<b>62.577.112</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5.	21.755.000.652	24.447.368.071
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>21.755.000.652</b>	<b>24.447.368.071</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>21.825.958.661</b>	<b>24.509.945.183</b>

Bogor, Mei 2024  
 Kuasa Pengguna Anggaran,

  
 Ir. Syafaruddin, Ph.D  
 NIP. 196408271993031001

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**  
**AUDITED**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	88.000.010,00	150.370.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>88.000.010,00</b>	<b>150.370.000,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	3.563.862.271,00	4.788.145.319,00
Beban Persediaan	D.3.	3.278.372.140,00	1.866.069.600,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.512.323.996,00	4.444.704.532,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	810.560.906,00	707.585.547,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.657.102.867,00	2.248.767.777,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.385.397.622,00	1.714.194.706,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>16.207.619.802,00</b>	<b>15.769.467.481,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-16.119.619.792,00</b>	<b>-15.619.097.481,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	71.073.740,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>71.073.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-16.048.546.052,00</b>	<b>-15.619.097.481,00</b>

Bogor, Mei 2024  
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Syafaruddin, Ph.D  
 NIP. 196408271993031001

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022  
AUDITED**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	24.447.368.071	24.179.555.255
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-16.048.546.052	-15.619.097.481
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0	1.882.085.000
Koreksi nilai Persediaan	E.3.1.		21.000
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	1.882.064.000
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	13.356.178.633	14.004.825.297
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	-2.692.367.419	267.812.816
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>21.755.000.652</b>	<b>24.447.368.071</b>

Bogor, Mei 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Syafaruddin, Ph.D  
NIP. 196408271993031001

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dengan tugas utama melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Sejalan dengan kebijakan strategis pembangunan perkebunan, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan difokuskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan;
3. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan;
4. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan;
5. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan; dan
7. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan didukung oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma dan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar dengan sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia terdiri dari 362 orang Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di lima unit kerja atau UPT sebagai berikut :
  - Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sebanyak 47 pegawai
  - Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebanyak 120 pegawai
  - Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat sebanyak 66 pegawai
  - Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma sebanyak 57 pegawai
  - Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebanyak 54 pegawai
2. Sarana komunikasi yang dilaksanakan dan yang diterbitkan lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah Jurnal Litri, Perspektif, Buletin Tro, Perkembangan Littro, Buletin Palma (yang sudah terakreditasi) serta Buletin Ristri, Warta Litbang dan Infotek Perkebunan (belum terakreditasi)
3. Kebun Percobaan seluas 837,7 ha, terdiri dari 18 kebun (16 kebun sudah bersertifikat, 2 kebun Pinjam Pakai)
4. Laboratorium dan Rumah Kaca

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan memiliki asset berupa Laboratorium dan Rumah kaca yang berdasarkan UPT nya adalah sebagai berikut:

- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengelola: Lab pelayanan/Pengujian Kimia (terakreditasi), Lab Fisiologi, Pemuliaan, Hama dan Penyakit
  - Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat mengelola: Lab Benih, Kultur Jaringan, Pemuliaan, Entomologi/ Fitopathologi, Uji Mutu Hasil dan Tanaman
  - Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma mengelola: Lab Teknologi Hasil, Bioteknologi, Pemuliaan, Hama dan penyakit, dan Ekofisiologi
  - Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar mengelola: Lab Hama, Penyakit, dan Ekofisiologi
5. Anggaran Standardisasi Instrumen pada PSI Perkebunan berasal dari APBN dan Kerja sama.

Efektivitas dan efisiensi kegiatan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tidak terlepas dari dukungan kelembagaan dan sistem manajemen yang handal. Perkembangan manajemen modern terus dikaji, dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan dinamika pembangunan perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis baik global maupun dalam negeri. Oleh karena itu, PSI Perkebunan harus menetapkan visi dan misi yang futuristik dan partisipatif agar mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Untuk menjawab tantangan di atas perlu dilakukan reorientasi sistem manajemen internal kelembagaan standardisasi instrumen pertanian.

Dalam kerangka operasionalisasinya, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan pembangunan perkebunan terhadap dukungan standardisasi instrumen dan perkembangan kapasitas pengelolaan kelembagaan standardisasi instrumen perkebunan.

### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dengan tugas utama melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

### **Deskripsi Tugas**

Deskripsi Tugas Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

### **Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan**

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan.

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan;
3. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan;
4. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan;
5. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan; dan
7. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Visi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian yaitu:

**“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Misi mengacu kepada Misi Kementerian Pertanian yaitu :

- Mewujudkan ketahanan pangan;
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

### **Program Strategis Perkebunan**

Program Strategis Perkebunan Prioritas Standardisasi dalam Renstra berdasarkan komoditas:

**a. Komoditas Mandat:**

Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, Kopi, Kakao, Karet, Teh, Pemanis dan Serat, Kelapa dan Palma Lain serta Minyak Industri.

**b. Komoditas Potensial:**

Panili, Pala, dan Kemiri, Lempuyang Wangi, Akar wangi, Serai wangi, Jarak Keyar, Kenaf, Bunga Matahari, Pinang dan Lontar.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI yaitu serangkaian prosedur sistem yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan proses operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI yang dipergunakan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan terdiri dari Modul Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, PPSPM, Persediaan, Aset Tetap dan Modul GLP. Aplikasi SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Standardisasi

Instrumen Perkebunan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. DIPA pada tahun anggaran 2023 mengalami Revisi sebanyak tiga belas kali (13) kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah, adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan dan juga adanya revisi mengenai Belanja Barang.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	26.250.000,00	26.250.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.843.523.000,00	3.642.787.000,00
Belanja Barang Operasional	2.145.090.000,00	2.231.490.000,00
Belanja Barang Non Operasional	16.488.329.000,00	1.285.250.000,00
Belanja Barang Persediaan	9.848.924.000,00	1.732.744.000,00
Belanja Jasa	5.865.540.000,00	1.162.454.000,00
Belanja Pemeliharaan	707.640.000,00	811.162.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	26.980.000.000,00	2.787.990.000,00
Belanja Perjalanan Paket Meeting	0,00	276.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.528.100.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	237.381.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>88.407.146.000,00</b>	<b>14.167.258.000,00</b>

## B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 159.073.750 atau mencapai 606% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 26.250.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	11.250.000	88.000.010	782,22
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	63.461.000	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	7.612.740	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.000.000	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>26.250.000</b>	<b>159.073.750</b>	<b>606</b>

Realisasi Pendapatan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 159.073.750 terdiri dari hasil penjualan pertanian berupa penjualan tebu giling hasil pembenihan G2 sebesar Rp88.000.010. Dengan bukti penerimaan Negara pada tanggal bayar 11 Mei 2023 yang nomor NTB 929418299395 dan NTPN nomor 8EF977QLUFP80FHA, dari Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara sebesar Rp 63.461.000 dari Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga sebesar Rp 7.612.740. Realisasi Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2023 lebih besar 5,79% dibandingkan 31 Desember 2022. (terlampir)

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	88.000.010	150.370.000	-41,48
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	63.461.000	0	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	7.612.740	0	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>159.073.750</b>	<b>150.370.000</b>	<b>5,79</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.443.034.327,00 atau 94,89% dari anggaran belanja sebesar Rp14.167.258.000,00. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp 2.154.494 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 887, dan belanja barang sebesar Rp 2.153.607,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.642.787.000,00	3.563.863.158,00	97,83
Belanja Barang	10.287.090.000,00	9.644.276.169,00	93,75
Belanja Modal	237.381.000,00	234.895.000,00	98,95
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>14.167.258.000,00</b>	<b>13.443.034.327,00</b>	<b>94,89</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-2.154.494,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>14.167.258.000,00</b>	<b>13.440.879.833,00</b>	<b>94,87</b>

Dibandingkan dengan 31 Desember 2022, Realisasi Belanja 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 5,05% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain dengan menurunnya pagu anggaran karena recofusing dan transformasi kelembagaan.

### Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	3.563.863.158,00	4.789.406.175,00	-25,59
Belanja Barang	9.644.276.169,00	9.143.298.478,00	5,48
Belanja Modal	234.895.000,00	223.751.500,00	4,98
<b>Total Belanja</b>	<b>13.443.034.327,00</b>	<b>14.156.456.153,00</b>	<b>-5,04</b>

## B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.563.863.158,00 dan Rp4.789.406.175,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 25,59% dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan dengan adanya pegawai yang pensiun sebanyak 4 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.563.863.158,00	4.789.406.175,00	(25,59)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.563.863.158,00</b>	<b>4.789.406.175,00</b>	<b>(25,59)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-887,00	-1.260.856,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.563.862.271,00</b>	<b>4.788.145.319,00</b>	<b>(25,57)</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.644.276.169,00 dan Rp9.143.298.478,00. Realisasi belanja barang 31 Desember 2023 naik sebesar 5,46% dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain dengan meningkatnya pagu anggaran dan telah terealisasinya beberapa kegiatan terutama untuk kegiatan 002 (rutin).

Perbandingan Belanja Barang  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.212.765.600,00	2.079.441.500,00	6,41
Belanja Barang Non Operasional	1.230.528.200,00	1.491.716.200,00	-17,51
Belanja Barang Persediaan	1.670.515.690,00	1.740.481.900,00	-4,02
Belanja Jasa	1.060.649.299,00	875.421.554,00	21,16
Belanja Pemeliharaan	810.560.906,00	707.469.547,00	14,57
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.384.736.883,00	2.248.767.777,00	6,05
Belanja Perjalanan Paket Meeting	274.519.591,00	0,00	100
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.644.276.169,00</b>	<b>9.143.298.478,00</b>	<b>5,48</b>
Pengembalian Belanja Barang	-2.153.607,00		0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.642.122.562,00</b>	<b>9.143.298.478,00</b>	<b>5,46</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp234.895.000,00 dan Rp213.872.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,98% dibandingkan 31 Desember 2022. Terdapat Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Perpres

No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah J.O Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri serta memperhatikan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B847/RC.010/A/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Kementerian Pertanian khususnya pada poin dua "Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN dibawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri", Sehubungan dengan hal tersebut maka proses pengadaan belanja modal masih belum terealisasi terhadap produk yang terkena nilai TKDN dibawah 25%.

**Perbandingan Belanja Modal  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	213.872.500,00	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.895.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	0,00	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>234.895.000,00</b>	<b>213.872.500,00</b>	<b>4,98</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>234.895.000,00</b>	<b>213.872.500,00</b>	<b>4,98</b>

### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp213.872.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan adanya surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B847/RC.010/A/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Kementerian Pertanian khususnya pada poin dua "Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN dibawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Sehubungan dengan hal tersebut maka proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin tidak terealisasi terhadap produk yang terkena nilai TKDN dibawah 25%.

**Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	213.872.500,00	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>213.872.500,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>213.872.500,00</b>	<b>-100,00</b>

### B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp234.895.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan pada 31 Desember 2022 tidak terdapatnya Pagu Anggaran untuk Belanja Modal dan Bangunan sehingga tidak ada realisasinya.

#### Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.895.000,00	0,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	234.895.000,00	0,00	100,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	234.895.000,00	0,00	100,00

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1.ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

#### C.1.2 Persediaan

Saldo Persediaan pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (237291) per 31 Desember 2023 sebesar Rp154.052.100 (seratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu seratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.761.908.550 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan mutasi tambah Rp1.670.515.690 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), mutasi kurang Rp3.278.372.140 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) Berdasarkan pembelian per Akun Belanja Barang :

Kode	Uraian	Jumlah
<b>PEMBELIAN</b>		
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumisi	1.561.699.690
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid 19	108.816.000
<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>1.670.515.690</b>

Berdasarkan Mutasi Persediaan per kode barang

Kode	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Nilai 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
117111	Barang Konsumsi	4.484.550	851.091.390	(851.923.840)	3.652.100
117131	Bahan Baku		557.608.300	(556.908.300)	700.000
117199	Persediaan Lainnya	1.757.424.000	261.816.000	(1.869.540.000)	149.700.000
<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>1.761.908.550</b>	<b>1.670.515.690</b>	<b>(3.278.372.140)</b>	<b>154.052.100</b>

Berdasarkan dari pencatatan pada Aplikasi Sakti Persediaan pada transaksi tahun berjalan maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

Mutas Tambah :

- Pembelian persediaan barang konsumsi tahun anggaran 2023 yang membentuk barang persediaan dengan nilai total sebesar Rp 851.091.390
- Pembelian persediaan bahan baku tahun anggaran 2023 yang membentuk barang persediaan dengan nilai total sebesar Rp 557.609.300
- Pembelian persediaan persediaan lainnya tahun anggaran 2023 yang membentuk barang persediaan dengan nilai total sebesar Rp 261.816.000

Mutas Kurang :

- Habis pakai barang konsumsi tahun anggaran 2023 yang mengurangi nilai persediaan adalah sebesar Rp 850.945.490
- Hasil Opname Fisik barang konsumsi tahun anggaran 2023 yang mengurangi nilai persediaan adalah sebesar Rp 978.350
- Habis pakai bahan baku tahun anggaran 2023 yang mengurangi nilai persediaan adalah sebesar Rp 556.908.300
- Habis pakai persediaan lainnya berupa obat lainnya yang mengurangi nilai persediaan adalah sebesar Rp 108.816.000
- Habis pakai persediaan lainnya berupa tanaman benih kopi arabika yang telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang mengurangi nilai persediaan sebesar Rp 1.757.417.768
- Hasil Opname Fisik persediaan lainnya tahun anggaran 2023 yang mengurangi nilai persediaan adalah sebesar Rp 3.306.232

Berdasarkan Transaksi Persediaan Reklasifikasi

Kode	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Nilai 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
117111	Barang Konsumsi	4.484.550	851.091.390	(851.923.840)	3.652.100
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		-	-	-
117123	Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat		149.700.000		149.700.000
117131	Bahan Baku		557.608.300	(556.908.300)	700.000
117199	Persediaan Lainnya	1.757.424.000	261.816.000	(2.019.240.000)	-
<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>1.761.908.550</b>	<b>1.820.215.690</b>	<b>(3.428.072.140)</b>	<b>154.052.100</b>

- Reklasifikasi keluar persediaan lainnya berupa benih kopi arabika sigararutang sebesar Rp 149.700.000
- Reklasifikasi masuk hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa benih kopi sigararutang sebesar Rp 149.700.000
- Nilai Total penambahan dan pengurangan pada transaksi belanja barang persediaan telah sesuai pada user Sakti Persediaan dengan jumlah pemakaian atau beban pada User Sakti GLP.

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.670.531.997,00 dan Rp22.490.137.090,00. Namun, terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 20.365.379.997,00 sampai dengan 31 Desember 2023 sehingga dicatat pada Nilai Buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.305.152.000,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	22.490.137.090,00
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	0,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-819.605.093
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>21.670.531.997,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-20.365.379.997,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>1.305.152.000,00</b>

### C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.579.596.742,00 dan Rp. 22.270.329.192,00. Namun, terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 3.014.739.758,00 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dicatat pada Nilai Buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.564.856.984,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>22.270.329.192,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Nilai Langsung	64.395.000,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	74.372.550,00
Pembelian	170.500.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>22.579.596.742,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-3.014.739.758,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>19.564.856.984,00</b>

### C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.820.600.250,00 dan Rp2.943.665.250,00. Namun, terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.208.444.925,00 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dicatat pada Nilai Buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 612.155.325,00 Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>2.943.665.250,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-123.065.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>2.820.600.250,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-2.208.444.925,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>612.155.325,00</b>

### C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp-25.588.564.680,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	21.670.531.997,00	-20.365.379.997,00	1.305.152.000,00
2	Gedung dan Bangunan	22.579.596.742,00	-3.014.739.758,00	19.564.856.984,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.820.600.250,00	-2.208.444.925,00	612.155.325,00
4	Aset Tetap Lainnya	88.463.941,00	0	88.463.941,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>47.159.192.930,00</b>	<b>-25.588.564.680,00</b>	<b>21.570.628.250,00</b>

### C.3. ASET LAINNYA

#### Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.111.077.413,00 dan Rp168.407.320,00. Namun, terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.009.799.102,00 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dicatat pada Nilai Buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 101.278.311,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	168.407.320,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.111.077.413,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-1.009.799.102,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	101.278.311,00

### C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

#### Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp70.958.009,00 dan Rp62.577.112,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	70.958.009,00	62.577.112,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.958.009,00</b>	<b>62.577.112,00</b>

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp 70.958.009,- merupakan Tagihan Langganan Daya dan Jasa untuk pemakaian bulan Desember 2023 yaitu Langganan Listrik, Langganan Air dan Langganan Internet.

### C.5. EKUITAS

#### C.5.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.755.000.652,00 dan Rp24.447.368.071,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp88.000.010,00 dan Rp150.370.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan anggaran Lain-Lain		-	
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	88.000.010	150.370.000	(41,48)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>88.000.010</b>	<b>150.370.000</b>	<b>(41,48)</b>

Realisasi Pendapatan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 88.000.010,00 dari hasil penjualan pertanian berupa penjualan tebu giling hasil pembenihan G2 sebesar Rp 88.000.010,-. Dengan bukti penerimaan Negara pada tanggal bayar 11 Mei 2023 yang nomor NTB 929418299395 dan NTPN nomor 8EF977QLUFP80FHA. Realisasi Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2023 lebih kecil 41,48% dibandingkan 31 Desember 2022,

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.563.862.271,00 dan Rp4.788.145.319,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.540.720.200	3.160.244.100,00	-19,60
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		-856,00	
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.734	40.019,00	-15,71
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	182.221.290	250.808.110,00	-27,35
Beban Tunj. Anak PNS	47.267.630	61.117.802,00	-22,66
Beban Tunj. Struktural PNS	53.060.000	45.500.000,00	16,62
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		-1.260.000,00	

Beban Tunj. Fungsional PNS	193.644.000	580.842.000,00	-66,66
Beban Tunj. PPh PNS	11.869.757	51.108.744,00	-76,78
Beban Tunj. Beras PNS	128.400.660	160.772.400,00	-20,14
Beban Uang Makan PNS	327.795.000	393.443.000,00	-16,69
Beban Tunjangan Umum PNS	78.850.000	85.530.000,00	-7,81
<b>Jumlah</b>	<b>3.563.862.271</b>	<b>4.788.145.319</b>	<b>-25,57</b>

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.278.372.140,00 dan Rp1.866.069.600,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	851.923.840,00	817.842.500,00	4,17
Beban Persediaan bahan baku	556.908.300,00	610.897.100,00	-8,84
Beban persediaan lainnya	1.869.540.000,00	437.330.000,00	327,49
<b>Jumlah</b>	<b>3.278.372.140,00</b>	<b>1.866.069.600,00</b>	<b>75,68</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.512.323.996,00 dan Rp4.444.704.532,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	411.138.200,00	234.476.200,00	75,34
Beban Barang Non Operasional Lainnya	706.590.000,00	1.142.040.000,00	-38,13
Beban Barang Operasional Lainnya	153.705.600,00	82.915.000,00	85,38
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136.512.000,00	153.252.000,00	-10,92
Beban Honor Output Kegiatan	112.800.000,00	115.200.000,00	-2,08
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		9.575.000,00	-100,00
Beban Jasa Profesi	144.420.000,00	19.950.000,00	623,91

Beban Keperluan Perkantoran	1.916.418.000,00	1.836.842.500,00	4,33
Beban Langganan Air	94.377.850,00	92.030.500,00	2,55
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	105.576.250,00	115.182.677,00	-8,34
Beban Langganan Listrik	653.185.172,00	632.467.397,00	3,28
Beban Langganan Telepon	2.894.924,00	4.341.258,00	-33,32
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.130.000,00	6.432.000,00	-4,70
Beban Sewa	68.576.000,00		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>4.512.323.996,00</b>	<b>4.444.704.532,00</b>	<b>1,52</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp810.560.906,00 dan Rp707.585.547,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	564.415.000,00	479.957.600,00	17,60
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246.145.906,00	227.511.947,00	8,19
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		116.000,00	88771,86
<b>Jumlah</b>	<b>810.560.906,00</b>	<b>707.585.547,00</b>	<b>14,55</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.657.102.867,00 dan Rp2.248.767.777,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.382.583.276,00	2.248.767.777,00	5,95
Pengembalian Beban Perjalan Biasa			#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	274.519.591,00		
<b>Jumlah</b>	<b>2.657.102.867,00</b>	<b>2.248.767.777,00</b>	<b>18,16</b>

#### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.385.397.622,00 dan Rp1.714.194.706,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	772.880.369,00	1.068.643.072,00	-27,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	538.961.433,00	533.949.147,00	0,94
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	52.455.999,00	90.502.666,00	-42,04
Beban Penyusutan Irigasi	18.725.402,00	20.261.350,00	-7,58
Beban Penyusutan Jaringan	79.950,00	159.900,00	-50,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.294.469,00	678.571,00	238,13
<b>Jumlah</b>	<b>1.385.397.622,00</b>	<b>1.714.194.706,00</b>	<b>-19,18</b>

#### D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 71.073.740,00 dan Rp0,00.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.447.368.071,00 dan Rp24.179.555.255,00

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-16.048.546.052,00 dan Rp-15.619.097.481,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp21.000,00.

#### E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.356.178.633,00 dan Rp14.004.825.297,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

### E.5. Ekuitas akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.755.000.652,00 dan Rp24.447.368.071,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Rekening yang digunakan dalam pengelolaan anggaran pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah rekening Bendahara Pengeluaran dengan No. Rek 0012.01.000054.30.7 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor, yang telah disahkan penggunaannya oleh KPPN Bogor sesuai Surat Persetujuan Rekening No. S.0103/WPB.12/KP.04/2008 tanggal 14 Januari 2008. Nomor rekening tersebut digunakan untuk menampung seluruh kegiatan Puslitbang Perkebunan dari APBN.

Melalui surat Kepala Badan Litbang Pertanian nomor B-1458/KU.070/H.1/06/2020 tanggal 24 September 2020 hal permohonan persetujuan perubahan rekening satker, maka melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V nomor S-1253/WPB.12/KP.05/2020 tanggal 25 September 2020 memberikan persetujuan Rekening Virtual Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian yang dibuka pada Bank Rakyat Indonesia.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Dalam pelaksanaan anggaran sampai 31 Desember 2023 Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah melakukan 8 (delapan) kali revisi POK, sedangkan Revisi DIPA telah dilakukan sebanyak 8 kali.
2. Puslitbang Perkebunan telah melaksanakan Penetapan Status Penggunaan barang milik negara sebanyak 30 (tiga puluh) kali :
  - 1) Keputusan Menteri Keuangan nomor 39/KM.6/WKN.8/KNL.03/2015 tanggal 1 Mei 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 18 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 1.296.525.00,-
  - 2) Keputusan Menteri Keuangan nomor 47/KM.06/WKN.08/KNL.03/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 297.400.000,-
  - 3) Keputusan Menteri Keuangan nomor 13/KM.6/WKN.8/KNL.03/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 48 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 4.153.330.210,-
  - 4) Keputusan Menteri Keuangan nomor 26/KM.6/WKN.8/KNL.03/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 51 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.295.120.579,-
  - 5) Keputusan Menteri Pertanian nomor 295/Kpts/PL.320/5/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1.161 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.515.673.840,-
  - 6) Keputusan Menteri Pertanian nomor 669/Kpts/PL.310/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 785 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.567.048.776,-

- 7) Keputusan Menteri Pertanian nomor 21/Kpts/PL.310/1/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 192 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 666.926.946,-
- 8) Keputusan Menteri Pertanian nomor 324/Kpts/PL.310/5/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 321 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 1.039.708.750,-
- 9) Keputusan Menteri Keuangan nomor 81/KM.6/WKN.8/KNL.03/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian Berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 7 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 2.697.446.000,-
- 10) Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KM.6/KN.8/KN.5/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 10.419.608.350,-
- 11) Keputusan Menteri Keuangan nomor 113/KM.6/KN.5/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 5.902.435.534,-
- 12) Keputusan Menteri Keuangan nomor 100/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 21 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.150.547.130,-
- 13) Keputusan Menteri Pertanian nomor 324/Kpts/PL.310/5/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 162 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 655.587.233,-
- 14) Keputusan Menteri Keuangan nomor 91/KM.6/KN.8/KNL.03/2017 tanggal 28 Juli 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 409.000.000,-
- 15) Keputusan Menteri Keuangan nomor 92/KM.6/KN.8/KNL.03/2017 tanggal 28 Juli 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 8 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 8.781.141.680,-
- 16) Keputusan Menteri Pertanian nomor 607/Kpts/PL.310/9/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 90 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 916.941.900,-
- 17) Keputusan Menteri Keuangan nomor 34/KM.6/WKN.8/KNL.03/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 26 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 4.835.334.909,-
- 18) Keputusan Menteri Keuangan nomor 15/KM.6/WKN.08/KNL.03/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa 4 (empat) unit kendaraan bermotor dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 283.813.000,-

- 19) Keputusan Menteri Keuangan nomor 33/KM.6/WKN.8/KNL.03/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 6.179.347.650,-
- 20) Keputusan Menteri Pertanian nomor 882/Kpts/PL.310/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 330 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 2.284.041.155,-
- 21) Keputusan Menteri Keuangan nomor 56/KM.6/WKN.8/KNL.03/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 6 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 979.909.868,-
- 22) Keputusan Menteri Keuangan nomor 72/KM.6/WKN.8/KNL.03/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Kendaraan Dinas sebanyak 11 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 542.732.023,-
- 23) Keputusan Menteri Pertanian nomor 565/Kpts/PL.310/A/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 26 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 426.471.000,-
- 24) Keputusan Menteri Keuangan nomor 127/KM.6/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 4 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 930.919.000,-
- 25) Keputusan Menteri Keuangan nomor 126/KM.6/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 9 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 1.894.742.000,-
- 26) Keputusan Menteri Keuangan nomor 54/KM.6/WKN.08/KNL.03/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 2 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 1.038.000.000,-
- 27) Keputusan Menteri Pertanian nomor 190/Kpts/PL.310/A/3/2020 tanggal 13 april 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 76 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 313.995.550,-
- 28) Keputusan Menteri Keuangan nomor 126/KM.6/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 9 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 1.894.742.000,-
- 29) Keputusan Menteri Keuangan nomor 148/KM.6/WKN.08/KNL.03/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 2 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 1.079.260.000,-
- 30) Keputusan Menteri Keuangan nomor 149/KM.6/WKN.08/KNL.03/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung Bangunan dan Irigasi sebanyak 5 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 813.106.850,-

- 3) Terdapat Pagu Anggaran 521841 Belanja Barang Persediaan - Penangan Pandemi Covid 19 sebesar Rp 108.930.000, per 31 Desember 2023 Realisasi sebesar Rp 108.816.000 atau 99.90% dari Pagu Anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp 114.000,-. Sudah dilakukan revisi sehingga tidak terdapat sisa anggaran untuk 521841 Belanja Barang Persediaan - Penangan Pandemi Covid 19
- 4) Terdapat Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp 70.958.009,- merupakan tagihan langgan Daya dan Jasa untuk pemakaian bulan desember 2023 yaitu Langgan Listrik, Langgan Air dan Langgan Internet.
- 5) Terdapat pegawai yang pensiun sebanyak 4 orang, 1 pegawai yang meninggal dunia dan 10 Pegawai Eks Peneliti yang pindah ke BRIN.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN 018  
**ESELON I** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 09  
**SATUAN KERJA** : PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN 237291

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 7:34 AM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,167,258,000	13,440,879,833	(726,378,167)	95	14,618,574,000	14,155,195,297	(463,378,703)	97
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Bogor, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
Ir.Syafaruddin, Ph.D  
196408271993031001

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:34 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	154,052,100	1,761,908,550	(1,607,856,450)	(91.26)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>154,052,100</b>	<b>1,761,908,550</b>	<b>(1,607,856,450)</b>	<b>(91.26)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	21,670,531,997	22,490,137,090	(819,605,093)	(3.64)
Gedung dan Bangunan	22,579,596,742	22,270,329,192	309,267,550	1.39
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,820,600,250	2,943,665,250	(123,065,000)	(4.18)
Aset Tetap Lainnya	88,463,941	88,463,941	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(25,588,564,680)	(25,045,576,696)	(542,987,984)	2.17
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>21,570,628,250</b>	<b>22,747,018,777</b>	<b>(1,176,390,527)</b>	<b>(5.17)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	1,111,077,413	168,407,320	942,670,093	559.76
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,009,799,102)	(167,389,464)	(842,409,638)	503.26
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>101,278,311</b>	<b>1,017,856</b>	<b>100,260,455</b>	<b>9,850.16</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>21,825,958,661</b>	<b>24,509,945,183</b>	<b>(2,683,986,522)</b>	<b>(10.95)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	70,958,009	62,577,112	8,380,897	13.39
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>70,958,009</b>	<b>62,577,112</b>	<b>8,380,897</b>	<b>13.39</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>70,958,009</b>	<b>62,577,112</b>	<b>8,380,897</b>	<b>13.39</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	21,755,000,652	24,447,368,071	(2,692,367,419)	(11.01)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21,755,000,652</b>	<b>24,447,368,071</b>	<b>(2,692,367,419)</b>	<b>(11.01)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21,755,000,652</b>	<b>24,447,368,071</b>	<b>(2,692,367,419)</b>	<b>(11.01)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>21,825,958,661</b>	<b>24,509,945,183</b>	<b>(2,683,986,522)</b>	<b>(10.95)</b>

Keterangan :

FINAL

Bogor, 13 Mei 2024  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Syafaruddin, Ph.D  
 196408271993031001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:34 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	88,000,010	150,370,000	(62,369,990)	(41.478)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	88,000,010	150,370,000	(62,369,990)	(41.478)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	88,000,010	150,370,000	(62,369,990)	(41.478)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,563,862,271	4,788,145,319	(1,224,283,048)	(25.569)
Beban Persediaan	3,278,372,140	1,866,069,600	1,412,302,540	75.683
Beban Barang dan Jasa	4,512,323,996	4,444,704,532	67,619,464	1.521
Beban Pemeliharaan	810,560,906	707,585,547	102,975,359	14.553
Beban Perjalanan Dinas	2,657,102,867	2,248,767,777	408,335,090	18.158
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:34 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,385,397,622	1,714,194,706	(328,797,084)	(19.181)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>16,207,619,802</b>	<b>15,769,467,481</b>	<b>438,152,321</b>	<b>2.778</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(16,119,619,792)</b>	<b>(15,619,097,481)</b>	<b>(500,522,311)</b>	<b>3.205</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71,073,740	0	71,073,740	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71,073,740	0	71,073,740	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>71,073,740</b>	<b>0</b>	<b>71,073,740</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(16,048,546,052)</b>	<b>(15,619,097,481)</b>	<b>(429,448,571)</b>	<b>2.75</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(16,048,546,052)</b>	<b>(15,619,097,481)</b>	<b>(429,448,571)</b>	<b>2.75</b>

Keterangan :

FINAL

Bogor, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. Syafaruddin, Ph.D

196408271993031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT  
SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:34 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,447,368,071	24,179,555,255	267,812,816	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16,048,546,052)	(15,619,097,481)	(429,448,571)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	1,882,085,000	(1,882,085,000)	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	21,000	(21,000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	1,882,064,000	(1,882,064,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,356,178,633	14,004,825,297	(648,646,664)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,692,367,419)	267,812,816	(2,960,180,235)	-
EKUITAS AKHIR	21,755,000,652	24,447,368,071	(2,692,367,419)	-

Keterangan :

FINAL

Bogor, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Syafaruddin, Ph.D  
196408271993031001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:35 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	13,440,879,833
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	159,073,750	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	88,000,010
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	63,461,000
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	7,612,740
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,540,720,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,621	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	182,221,290	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	47,267,630	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	53,060,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	193,644,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,869,757	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	128,400,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	327,795,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	78,850,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,916,418,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,130,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	136,512,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	153,705,600	0
3.0	521211	Belanja Bahan	411,138,200	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	112,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	706,590,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,561,699,690	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	108,816,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	652,236,375	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,894,924	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	94,271,750	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	98,250,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	68,576,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	144,420,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	564,415,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246,145,906	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,384,736,883	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	274,519,591	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170,500,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	64,395,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	887

**NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT  
SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:35 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,153,607
<b>JUMLAH</b>			<b>13,602,108,077</b>	<b>13,602,108,077</b>

Keterangan :

FINAL

Bogor, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir.Syafaruddin, Ph.D

196408271993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT  
SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:34 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,652,100	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	149,700,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	700,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	21,670,531,997	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	22,579,596,742	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,157,825,400	0
0.0	134112	Irigasi	662,774,850	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	88,463,941	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	20,365,379,997
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,014,739,758
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,100,188,068
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	108,256,857
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,111,077,413	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,009,799,102
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	70,958,009
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,440,879,833
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	159,073,750	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	74,372,550
0.0	391111	Ekuitas	0	24,447,368,071
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	88,000,010
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	63,461,000
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	7,612,740
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,540,720,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	33,734	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	182,221,290	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	47,267,630	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	53,060,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	193,644,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,869,757	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	128,400,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	327,795,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	78,850,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,916,418,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,130,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136,512,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	153,705,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	411,138,200	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0200 ) JAWA BARAT  
SATUAN KERJA : ( 237291 ) PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Tgl Data : 13/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 7:34 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	112,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	706,590,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	653,185,172	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,894,924	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	94,377,850	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	105,576,250	0
3.0	522141	Beban Sewa	68,576,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	144,420,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	564,415,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246,145,906	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,382,583,276	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	274,519,591	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	772,880,369	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	538,961,433	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	52,455,999	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	18,725,402	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	79,950	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,294,469	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	851,923,840	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	556,908,300	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,869,540,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>64,791,015,995</b>	<b>64,791,015,995</b>

Keterangan :

FINAL

Bogor, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir.Syafaruddin, Ph.D

196408271993031001